

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK DERAH DI BADAN
KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015-2018**

TUGAS AKHIR

Diajukan judul kepada tim penguji tugas akhir program studi manajemen pajak

(DIII) sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya



Oleh :

FAKHRI RAMADHAN
BP/ NIM : 2016/ 16233026

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOMA III

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2019

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**TINJAUAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI BADAN
KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015-2018**

Nama : Fakhri Ramadhan
NIM : 16233026
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Ekonomi

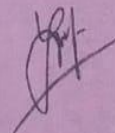
Padang, Agustus 2019

Diketahui Oleh
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh
Pembimbing



Chichi Andriani, SE, MM
NIP. 19840107 200912 2 003



Yuki Fitria, SE, MM
NIP. 19820722 201012 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN PAJAK DAERAH DI BADAN
KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2015-2018

Nama : Fakhri Ramadhan

NIM : 16233026

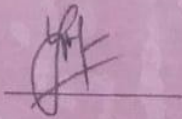
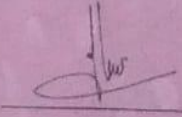
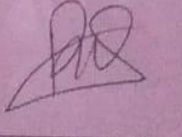
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)

Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi
Manajemen Pajak (DIII) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji

Nama		Tanda Tangan
1. Yuki Fitria, SE. MM.	(Ketua)	
2. Mike Yolanda, SP. MM.	(Anggota)	
3. Rani Sofya, S.Pd, M.Pd.	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fakhri Ramadhan

Thn. Masuk/NIM : 2016/ 16233026

Tempat/Tgl. Lahir : Koto Baru, 27 Januari 1997

Program Studi : Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Alamat : Jl. Seberang Piruko Timur

Judul Tugas Akhir : Tinjauan Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2019



Fakhri Ramadhan

NIM. 16233026.

ABSTRAK

Fakhri Ramadhan : Tinjauan Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018.

Pembimbing : Yuki Fitria, SE, MM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan hambatan yang dihadapi Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam proses pemungutan pajak daerah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data dikumpulkan melalui wawancara dan juga diperoleh dari sumber - sumber yang telah ada pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerimaan pendapatan pajak daerah dari tahun 2015 - 2018 mengalami pencapaian target yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah terhadap target yang telah ditetapkan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi Pada tahun 2015 tingkat pencapaian sebesar 104.12%, dari persentase tersebut maka dapat dikategorikan Sangat Efektif. Pada tahun 2016 dengan tingkat pencapaian sebesar 82.27%, maka dapat dikategorikan penerimaan pendapatan pajak pada tahun 2016 cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2017 dengan tingkat pencapaian sebesar 83.10%, maka dapat dikategorikan cukup efektif. Dan untuk tahun 2018 dengan tingkat pencapaian sebesar 95.87%, maka dapat dikategorikan Efektif. Artinya Badan Keuangan kota Bukittinggi telah mampu melakukan manajemen Pajak Daerah dengan Efektif, yaitu dapat dilihat dari persentasi tingkat pencapaian tidak ada yang dikategorikan kurang efektif maupun tidak efektif.

Kata Kunci : Efektivitas, Pajak Daerah

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018”**. Tugas akhir ini merupakan prasyarat yang harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. ALLAH SWT yang telah memberikan kemudahan sehingga laporan ini dapat terselesaikan, serta baginda rasullullah MUHAMMAD SAW sebagai pemotivasi penulis lewat kisah-kisah hidup beliau.
2. Orangtua tercinta, yakni ayahanda Dawair dan ibunda Syamsiar serta semua saudara yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
3. Bapak Prof. Ganefri, Ph, D selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
4. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak .
6. Ibu Yuki Fitria, SE, MM selaku dosen pembimbing tugas akhir.
7. Bapak Firman, S.E.,M.Sc selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak/ Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Bapak/ Ibu selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dalam kesempurnaan tugas akhir.
10. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
11. Pustakawan/ wati Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
12. Keluarga besar D3 Manajemen Pajak 2016, Hamdi Januridin, Tax Nation dan teman-teman yang telah memberikan dukungan serta semangat untuk penulis dalam proses membuat laporan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin...

Padang, Agustus 2019,

Fakhri Ramadhan.

NIM. 16233026

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Pajak.....	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Azas Pemungutan Pajak	9
3. Fungsi Pajak	10
B. Pengertian Pendapatan Daerah	11
C. Pendapatan Asli Daerah	11
1. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	11
2. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	12

D. Pajak Daerah	14
E. Jenis-jenis Pajak Daerah	15
F. Dasar Pengenaan Pajak	21
G. Tarif Pajak Daerah	23
H. Hambatan dalam Pemungutan Pajak.....	24
I. Efektivitas Pajak Daerah.....	25
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	27
A. Bentuk Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	27
C. Rancangan Penelitian	27
BAB IV PEMBAHASAN.....	33
A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi	33
1. Sejarah Berdirinya Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	33
B. Visi dan Misi	35
C. Produk – produk/ Kegiatan Utama Perusahaan.....	36
D. Lokasi Badan Keuangan Bukittinggi	47
E. Struktur Organisasi	48
F. Hasil Penelitian dan Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	63
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Tabel Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Badan Keuangan Kota Bukittinggi	4
Tabel 2 Tabel Efektivitas Penerimaan Setiap Jenis Pajak Daerah Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018.....	50
Tabel 3 Tabel Target, Realisasi dan Tingkat Pencapaian Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Badan Keuangan Kota Bukittinggi	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Gambar Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	48
----------	---	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi	64
Lampiran 2. Surat Balasan Pengajuan Observasi	65
Lampiran 3. Stuktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	66
Lampiran 4. Daftar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2015	67
Lampiran 5. Daftar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016	68
Lampiran 6. Daftar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2017	69
Lampiran 7. Daftar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018	70
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.	71

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu, untuk mengatasi masalah kebutuhan dana pemerintah harus menggali potensi-potensi yang ada untuk dijadikan sebagai sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan.

Sumber-sumber dana pembiayaan pembangunan tersebut bisa berasal dari sektor pajak maupun bukan pajak. Penerimaan dari sektor pajak saat ini merupakan tumpuan bagi pendapatan negara khususnya dalam pembiayaan pembangunan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, khususnya yang bersumber dari pajak daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Otonomi membuka kesempatan bagi daerah untuk mengeluarkan segala potensinya secara optimal sehingga kemandirian daerah pun dalam pembiayaan

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat terwujud. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat serta peningkatan, pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber – sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis pajak daerah, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor pajak daerah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah (UU No 33 Tahun 2004). Adapun yang menjadi sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah.

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan, sedangkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan di sentralisasi, adapun maksud dari lain-lain pendapatan daerah bertujuan untuk memberi peluang kepada daerah untuk

memperoleh pendapatan selain dari PAD dan dana perimbang yang terdiri dari hibah dan dana darurat.

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Salah satu pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah pajak daerah. Menurut Marihot (2016: 10) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah.

Kota Bukittinggi merupakan kota yang terdapat pada Provinsi Sumatera Barat yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber

pendapatan daerahnya sendiri. Dalam menjalankan otonomi daerahnya kota Bukittinggi diharapkan mampu menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada. Mengingat pentingnya pencapaian target pendapatan pajak daerah yang sudah efektif, cukup efektif, dan bahkan masih ada pencapaian target pendapatan pajak daerah yang kurang efektif. Efektifitas diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

Dari beberapa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang paling penting karena setiap tahunnya pajak daerah mampu memberikan sumbangan yang cukup besar bagi penerimaan daerah. Namun demikian, hingga saat ini tingkat pencapaian pajak daerah atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi pajak daerah yang ditetapkan berdasarkan potensi real daerah setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018.

Tahun	Target / Anggaran Pajak Daerah (Rp)	Realisasi Pajak Daerah	Selisih	%
2015	27,855,512,078	29,002,326,911	1,146,814,833	104,12
2016	37,372,320,634	30,709,690,231	(6,662,630,403)	82,17
2017	46,068,135,193	38,282,140,327	(7,785,994,866)	83,10
2018	47,068,135,193	45,123,830,395	(1,944,304,798)	95,87

Sumber : Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi.

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa target dan realisasi pendapatan pajak daerah Kota Bukittinggi tahun 2015 – 2018 mengalami tingkat pencapaian yang berbeda dari apa yang ditargetkan dengan hasil realisasi yang

dicapai, ini dapat dilihat dari tingkat pencapaian persentase penerimaan pendapatan pajak daerah yang berbeda setiap tahunnya. Dari data tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2015 penerimaan pendapatan pajak daerah melebihi target yang telah ditetapkan, dengan target sebesar 27,855,512,078 dengan realisasi sebesar 29,002,326,911 dan selisih sebesar 1,146,814,833. Untuk tahun 2016 target atau anggaran pajak daerah yaitu sebesar 37,372,320,634 dengan realisasi sebesar 30,709,690,231 dan selisihnya sebesar (6,662,630,403), sedangkan pada tahun 2017 target atau anggaran pajak daerah meningkat sebesar 46,068,135,193 dengan realisasi sebesar 38,282,140,327 dan selisih sebesar (7,785,994,866). Untuk tahun 2018 dengan peningkatan target atau anggaran pajak daerah yang ditargetkan atau dianggarkan sebesar Rp 47,068,135,193 dan realisasinya sebesar Rp 45,123,830,395 dengan selisih sebesar (1,944,304,798) .

Perbandingan selisih antara target pendapatan pajak daerah dengan realisasi pencapaian pajak daerah dari tahun 2015 sampai 2018 mengalami fluktuasi dan dapat dilihat bahwa terdapat pencapaian target pendapatan pajak daerah yang cukup baik. Dilihat dari data diatas target anggaran pajak daerah naik tapi belum ada realisasinya yang mencapai 100%.

Dapat dilihat hingga saat ini tingkat pencapaian pendapatan pajak daerah atau realisasi pencapaian pajak daerah jika dibandingkan dengan target realisasi yang telah ditetapkan berdasarkan potensi *real* setiap tahunnya tidak selalu tercapai 100%. Oleh karena itu masih perlu usaha maksimal yang perlu

dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi agar dapat mencapai target yang ditetapkan dengan maksimal yaitu pencapaian realisasi hingga 100%.

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Efektivitas Pendapatan Pajak Daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2015 -2018.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat penulis rumuskan adalah adalah;

1. Bagaimana tingkat efektivitas pendapatan pajak daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018?
2. Apakah yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam proses pemungutan pajak daerah pada tahun 2015-2018?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana tingkat efektivitas pendapatan pajak daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi Tahun 2015-2018.
2. Mengetahui apakah yang menjadi kendala atau hambatan yang dihadapi Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam proses pemungutan pajak daerah pada tahun 2015-2018?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan bahan masukan bagi pihak pemerintah daerah seperti Badan Keuangan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi dalam membuat kebijakan-kebijakan mengenai pajak daerah.
3. Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti secara lebih mendalam dari masalah yang belum terungkap.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi mengenai tingkat efektivitas penerimaan pendapatan pajak daerah di Badan Keuangan Kota Bukittinggi, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Tingkat pencapaian penerimaan pendapatan pajak daerah dari tahun 2015 – 2018 mengalami pencapaian yang berbeda. Pada tahun 2015 tingkat pencapaian sebesar 104.12% dari persentase pendapatan yang melebihi 100% maka pajak daerah pada tahun 2015 dikategorikan sangat efektif. Pada tahun 2016 dengan tingkat pencapaian sebesar 82.17% maka dapat dikategorikan pendapatan pajak daerah tahun 2016 cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2017 dengan tingkat pencapaian sebesar 83.10% maka dikategorikan cukup efektif dan untuk tahun 2018 dengan tingkat pencapaian sebesar 95.87% maka dikategorikan efektif.
2. Tidak terealisasi penerimaan pendapatan pajak daerah dengan baik dikarenakan ada beberapa faktor, seperti target yang ditetapkan untuk setiap jenis daerah terlalu tinggi, kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap pajak itu sendiri, faktor ekonomi global dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak terutangnya. Hal tersebut merupakan salah satu perlawanan yang

dilakukan wajib pajak baik secara pasif dan aktif dalam proses pelaksanaan kewajiban perpajakan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan penulis kepada Badan Keuangan Kota Bukittinggi yaitu:

1. Kedepannya diharapkan Badan Keuangan Kota Bukittinggi dapat meningkatkan efektivitas pajak daerah dalam pengelolaan penerimaan pendapatan pajak daerah sehingga mencapai target dengan tingkat pencapaian yang maksimal atau efektif yaitu dengan melakukan manajemen dan pengelolaan penerimaan pendapatan pajak daerah yang efektif agar anggaran penerimaan pendapatan yang ditargetkan dapat tercapai dan sesuai dengan harapan.
2. Pemerintah kota Bukittinggi diharuskan mampu membuat peraturan yang tegas yang dapat memberikan efek jera terkait dengan penerimaan pendapatan daerah terhadap wajib pajak yang tidak taat akan pajak, dengan tujuan agar tercapainya penerimaan pendapatan pajak terutama pajak daerah secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Pekei, Beni. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta: Taushiah.
- Darwin. 2010. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nazir. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta Selatan: Ghalia Indonesia.
- Nurdin dan Dedi. 2017. *Perpajakan Teori dan Praktik*. Jakarta: Raja Gravindo
- Suryabrata, Sumadi. 2016. *Metedologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putra, windhu. 2018. *Tata Kelola Ekonomi Keuangan Daerah*. Depok: PT Grafindo persada.
- Resmi, Siti. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Kepmendagri No.690.900.327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan.